



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI HERNAWATI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR II BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **458238**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 8.755.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 4590 m2/1000 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, WARISAN Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/550 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/600 m2 di KAB / KOTA TRENGGALEK, WARISAN Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 382.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA SCUPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 32.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	395.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.564.500.000
III. HUTANG	Rp.	350.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.214.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.